

Walikota Minta LKPD Tepat Waktu

PONTIANAK. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak harus tepat waktu. Harapannya hasil audit BPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kelancaran audit pendahuluan dan review, Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selaku

pengguna anggaran beserta personal yang menangani keuangan dan barang (asset), untuk dapat menyiapkan bahan-bahan kelengkapan yang berkaitan dengan audit.

“Saya berharap hal ini untuk memudahkan komunikasi, informasi dan klarifikasi kepada BPK,” ungkap Sutarmidji usai kegiatan penjeleasan audit pendahuluan

laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2010 oleh Tim BPK RI Perwakilan Kalbar, di aula SSA Kantor Walikota Pontianak, Selasa (25/1).

Dikatakan Sutarmidji, SKPD di Kota Pontianak telah melakukan rapat koordinasi terkait rekomendasi BPK Perwakilan Kalbar, terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah. “Rapat koordinasi itu, agar pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 tidak banyak temuan lagi,” tegasnya.

Untuk memenuhi amanat pasal 31 ayat 1 Undang-undang nomor 17/2003, tentang keuangan negara, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa BPK RI harus disampaikan ke DPRD paling lambat Juni.

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor

8/2006, dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diatur bahwa Inspektori provinsi/kabupaten/kota melakukan review atas laporan keuangan.

“Hasil review ini menjadi dasar pertimbangan gubernur/walikota/bupati membuat Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) yang merupakan LKPD yang dikumpulkan pada BPK, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” papar Sutarmidji.

Pemerintah Kota Pontianak ke depan akan berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan, dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Agar tidak lagi menjadi temuan BPK. Mengingat temuan BPK terhadap LKPD banyak yang sifatnya kesalahan admini-

strasi. “Mudah-mudahan tahun mendatang laporan pengelolaan keuangan daerah semakin baik, sehingga tidak ada lagi temuan oleh BPK,” kata Sutarmidji.

Walikota juga menegaskan, SPJ dari Januari hingga Desember 2010 telah selesai dipertanggungjawabkan. Serta sisa UYHD telah disetorkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari neraca, LRA dan catatan atas laporan keuangan (CALK) telah selesai penyusunannya. Bahkan siap dilakukan review oleh Inspektori Kota Pontianak.

“Mudah-mudahan dengan adanya hal ini, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas. Khususnya pada pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Pontianak,” harapnya. (oen)